

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Organisasi nirlaba merupakan pilar penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencapai misi pelayanan, bukan mencari keuntungan komersial (Sri Adella Fitri, 2023). Berbeda dengan organisasi profit yang mengutamakan laba, aktivitas organisasi nirlaba berfokus pada pelayanan masyarakat luas dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada (Sutanto, 2021). Meskipun tidak berorientasi profit, organisasi ini tetap memerlukan pendanaan yang memadai untuk keberlangsungan operasionalnya, yang biasanya berasal dari sumbangan anggota, donasi masyarakat, atau bantuan pihak stakeholders lainnya sesuai dengan PSAK No. 45 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).

Dalam konteks yang lebih luas, peran organisasi nirlaba dalam perekonomian Indonesia semakin signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat peningkatan signifikan pada pengeluaran Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPR), dari Rp 208.097 miliar pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp 228.999 miliar di tahun 2022, dan mencapai Rp 260.731 miliar pada tahun 2023. Data ini menunjukkan besarnya peluang dan sekaligus kepercayaan publik terhadap sektor nirlaba, yang harus diimbangi dengan tata kelola yang baik agar dana masyarakat dapat digunakan secara optimal dan bertanggung jawab.

Namun, di balik peluang dan kepercayaan publik tersebut, terdapat kesenjangan (*gap*) yang cukup lebar antara harapan dan realita tata kelola keuangan organisasi nirlaba di Indonesia. Banyak organisasi *non-profit* di Indonesia masih belum mampu memenuhi standar akuntansi yang berlaku, dengan kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan pengetahuan mengenai sistem pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Melia Y., 2022).

Lemahnya sistem informasi akuntansi dalam organisasi nirlaba tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan fraud. Data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mengungkapkan fakta yang mencengangkan, dimana sekitar 130.000 klaim asuransi dinyatakan fraud akibat sistem yang tidak akuntabel (Muslih, 2019). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang tidak memenuhi karakteristik historis dan menyeluruh akan menghasilkan informasi yang kurang lengkap, sehingga sulit memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan organisasi.

Kesenjangan antara besarnya dana yang dikelola organisasi nirlaba dengan lemahnya kapasitas pengelolaan keuangan inilah yang melatarbelakangi pemilihan tema penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik, khususnya akuntabilitas dan transparansi, dapat mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba.

Kelayakan tema ini untuk dikaji semakin kuat dengan fokus penelitian pada organisasi yang spesifik dan memiliki signifikansi historis, yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Jawa Barat. PII adalah organisasi nirlaba yang telah berdiri sejak 4 Mei 1947 di Yogyakarta dengan visi mewujudkan "Kesempurnaan Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap rakyat Indonesia dan umat manusia" (Pelajar Islam Indonesia, 2021). Dengan visi tersebut, PII berupaya membentuk generasi muda yang berkualitas melalui penerapan nilai-nilai Islam.

Sebagai objek penelitian, PII Wilayah Jawa Barat memiliki karakteristik yang menarik. Meskipun beroperasi secara sukarela tanpa mengejar keuntungan finansial, dalam aspek manajemen, strukturnya menyerupai organisasi perusahaan, mencakup posisi seperti ketua umum, kepala bidang, serta bagian administrasi dan logistik. Struktur organisasi yang jelas ini menjadikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, penelitian di organisasi ini layak dilakukan untuk melihat penerapan teori akuntabilitas dan transparansi dalam konteks nyata sebuah organisasi kemasyarakatan.

Observasi awal yang dilakukan peneliti di PII Jawa Barat semakin menguatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Hasil kuesioner terhadap 10 responden yang mengisi *PreTest* mengungkap temuan yang beragam. Meskipun mayoritas responden menilai transparansi dan akuntabilitas PII secara umum "cukup positif", terdapat catatan kritis yang mengindikasikan perlunya perbaikan.

Di aspek transparansi, terungkap dua masalah utama. Pertama, mengenai aksesibilitas laporan keuangan, dimana kebanyakan responden merasa bahwalaporan keuangan cukup mudah diakses, namun ada beberapa yang menganggap aksesnya masih terbatas. Kedua, mengenai keterbukaan sistem informasi sumber dana, dimana sebagian besar responden setuju bahwa informasi sumber dana PII sudah disampaikan secara terbuka, namun ada beberapa yang menganggap masih terdapat ketidakterbukaan dalam beberapa hal atas informasinya.

Sementara di aspek akuntabilitas, responden memberikan tanggapan yang beragam. Di satu sisi, sebagian besar responden setuju atas pernyataan bahwa laporan keuangan PII sudah sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Di sisi lain, mengenai transparansi dalam proses pengelolaan dana, sebagian responden menilai bahwa pengelolaan dana sudah transparan, namun ada yang merasa masih ada ruang untuk peningkatan.

Hasil kuesioner ini menyatakan bahwa semakin tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, semakin tinggi pula kepercayaan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, terdapat beberapa kekhawatiran dari responden perihal peningkatan aksesibilitas informasi dan perlunya audit independen dalam memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dapat benar-benar akurat dan dapat dipercaya.

Kualitas laporan keuangan inilah yang menjadi variabel kunci dalam penelitian ini, yang sangat dipengaruhi oleh dua prinsip dasar tata kelola: akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dalam organisasi nirlaba mengacu pada kewajiban pengurus untuk menerapkan nilai-nilai sifat kejujuran, kepercayaan, keterbukaan dan intelektual dalam pengelolaan organisasi (Pratama, 2022). Konsep ini sejalan dengan pendapat Sumartik (2019) yang menyatakan bahwa dinamika organisasi dalam kekuasaan sangat dibutuhkan, termasuk kekuasaan produktif atau yang bersifat ekonomi, serta kekuasaan integratif yang berarti membawa kesetiaan dan mampu mengajak orang lain kepada tujuan bersama.

Sementara transparansi mencerminkan sejauh mana organisasi menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat diakses mengenai pengelolaan keuangannya (Sari M. Y., 2021). Dalam konteks laporan keuangan, transparansi mewajibkan organisasi untuk menyajikan informasi secara lengkap sesuai standar yang berlaku, memenuhi karakteristik historis dan menyeluruh sebagaimana dikemukakan Fitriana (2024).

Kedua konsep kunci ini merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan anggota dan stakeholders, yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan organisasi. Laporan keuangan yang berkualitas, yang dihasilkan melalui praktik akuntabilitas dan transparansi yang baik, dapat meningkatkan kepercayaan anggota, mengurangi potensi konflik internal, serta mendorong partisipasi aktif dalam organisasi.

Dalam aspek regulasi, pengelolaan keuangan organisasi *non-profit* di Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mewajibkan setiap organisasi nirlaba untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang transparan dan dapat diaudit. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2011 mengatur transparansi pengelolaan dana hibah atau bantuan yang diterima oleh organisasi nirlaba. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga telah mengeluarkan ISAK No. 35 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, yang menetapkan standar pelaporan bagi organisasi yang tidak berorientasi pada laba.

Namun, adanya regulasi yang komprehensif tidak serta merta diikuti dengan implementasi yang optimal di tingkat organisasi, sebagaimana terlihat dalam kasus PII Jawa Barat. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi tinggi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan menguji hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan dalam konteks organisasi nirlaba keagamaan di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola keuangan organisasi, khususnya bagi PII Jawa Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) dalam memperbaiki sistem pelaporan keuangan, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pengurus PII dalam mengembangkan sistem keuangan yang lebih transparan dan berkualitas. Lebih luas lagi, temuan penelitian

ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi organisasi nirlaba sejenis dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas, PII tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan stakeholders, tetapi juga memastikan tata kelola keuangan yang lebih baik yang pada akhirnya akan mendukung keberlangsungan organisasi dalam menjalankan misi sosial dan pendidikannya. Atas dasar argumen, kesenjangan, dan urgensi yang telah diuraikan secara komprehensif inilah, peneliti merasa tema ini layak, penting, dan strategis untuk diteliti, dengan harapan dapat memberikan kontribusi berarti baik bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor nirlaba maupun perbaikan praktik tata kelola organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut adalah identifikasi masalah yang relevan dengan ruang lingkup penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Jawa Barat:

1. Kesenjangan antara Besarnya Kepercayaan Publik dan Kapasitas Tata Kelola Keuangan
  - a. Masalah: Terdapat peningkatan signifikan pengeluaran Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) dari Rp 208,097 miliar (2021) menjadi Rp 260,731 miliar (2023) yang menunjukkan besarnya kepercayaan publik, namun tidak diimbangi dengan kapasitas tata kelola keuangan yang memadai pada banyak organisasi nirlaba di Indonesia.
  - b. Dampak: Ketidakmampuan memenuhi standar akuntansi yang berlaku berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan dan menimbulkan fraud, sebagaimana tercermin dalam data 130.000 klaim asuransi yang dinyatakan fraud akibat sistem tidak akuntabel.
2. Rendahnya Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Organisasi Nirlaba
  - a. Masalah: Banyak organisasi nirlaba mengalami kendala dalam sumber daya manusia dan pengetahuan mengenai sistem pencatatan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
  - b. Dampak: Laporan keuangan yang dihasilkan tidak memenuhi karakteristik historis dan menyeluruh, sehingga sulit memberikan gambaran akurat mengenai kondisi keuangan organisasi dan berpotensi menimbulkan misleading information.

3. Implementasi Prinsip Akuntabilitas yang Belum Optimal di PII Jawa Barat
  - a. Masalah: Hasil observasi awal menunjukkan bahwa meskipun mayoritas responden menilai akuntabilitas "cukup positif", masih terdapat ketidaksesuaian antara pengelolaan dana dengan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan intelektual yang seharusnya menjadi prinsip dasar akuntabilitas.
  - b. Dampak: Lemahnya akuntabilitas dapat mengurangi kepercayaan anggota dan stakeholders, serta berpotensi menimbulkan konflik internal dalam organisasi.
4. Terbatasnya Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan
  - a. Masalah: Terdapat dua masalah utama dalam transparansi yaitu: (1) aksesibilitas laporan keuangan yang masih terbatas, dan (2) ketidakterbukaan informasi sumber dana dalam beberapa aspek.
  - b. Dampak: Keterbatasan akses informasi keuangan menghambat kemampuan anggota untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan organisasi.

5. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi di Tingkat Organisasi
  - a. Masalah: Meskipun terdapat regulasi komprehensif (UU No. 28/2004, PMK No. 92/2011, ISAK No. 35), implementasi pada tingkat organisasi seperti PII Jawa Barat belum optimal.
  - b. Dampak: Adanya gap antara standar yang ditetapkan dengan praktik riil di lapangan mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat sepenuhnya diandalkan untuk pengambilan keputusan.
6. Perlunya Audit Independen untuk Meningkatkan Kredibilitas Laporan Keuangan
  - a. Masalah: Responden menyatakan kekhawatiran mengenai perlunya audit independen untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas laporan keuangan.
  - b. Dampak: Tanpa verifikasi independen, kredibilitas laporan keuangan dipertanyakan dan berpotensi mengurangi kepercayaan stakeholders.
7. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
  - a. Masalah: Belum diketahui secara empiris sejauh mana akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam konteks organisasi nirlaba keagamaan seperti PII.
  - b. Dampak: Ketidaktahuan ini menghambat pengembangan strategi peningkatan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien.

Identifikasi masalah ini menunjukkan urgensi penelitian untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan tata kelola keuangan organisasi nirlaba, khususnya dalam konteks PII Jawa Barat sebagai objek penelitian.

### **C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Jawa Barat. Ruang lingkup penelitian mencakup:

- a. **Objek Penelitian:** Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat periode kepengurusan 2023-2025, dengan fokus pada Pengurus Wilayah yang tercantumkan dalam Surat Keputusan (SK).
- b. **Variabel Penelitian**
  - 1) **Variabel Independen** : Akuntabilitas dan Transparansi
  - 2) **Variabel Dependen** : Kualitas Laporan Keuangan
- c. **Aspek Waktu:** Penelitian dilakukan pada periode Maret – Desember 2025, dengan data yang dikaji mencakup praktik tata kelola keuangan selama periode kepengurusan 2023-2025.
- d. **Aspek Geografis:** Penelitian terbatas pada wilayah Jawa Barat, meliputi struktur organisasi PII di tingkat wilayah.

## 2. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan menghindari perluasan pembahasan yang terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada:

- a. Batasan Variabel: Penelitian hanya mengkaji dua variabel independen (akuntabilitas dan transparansi) terhadap satu variabel dependen (kualitas laporan keuangan), dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Variabel Akuntabilitas:

- a) Kepatuhan terhadap SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
- b) Sistem pertanggungjawaban keuangan
- c) Penerapan prinsip kejujuran dalam pengelolaan dana
- d) Mekanisme pengawasan internal

- 2) Variabel Transparansi:

- a) Aksesibilitas laporan keuangan
- b) Keterbukaan informasi sumber dana
- c) Kejelasan dalam pelaporan
- d) Keterbukaan proses pengelolaan dana

- 3) Variabel Kualitas Laporan Keuangan:

- a) Kesesuaian dengan karakteristik historis
- b) Kelengkapan informasi
- c) Keterandalan (*reliability*)
- d) Keterpahaman (*understandability*)

- b. **Batasan Responden:** Penelitian terbatas pada 38 orang pengurus PII Wilayah Jawa Barat periode 2023-2025 yang terdiri dari Ketua Umum, Badan Pengurus Harian, dan kepala departemen yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan organisasi.
- c. **Batasan Aspek Regulasi:** Penelitian mengacu pada standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba, khususnya SAK ETAP, serta peraturan internal PII tentang pengelolaan keuangan, tanpa membahas secara mendetail seluruh regulasi yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan.
- d. **Batasan Metodologi:** Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner, tanpa melakukan audit mendalam terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

### 3. Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

- a. Responden dianggap memahami dengan baik mekanisme pengelolaan keuangan di PII Wilayah Jawa Barat.
- b. Data yang diperoleh dari kuesioner dianggap jujur dan objektif menggambarkan kondisi sebenarnya.

- c. Standar akuntansi yang digunakan mengacu pada SAK ETAP yang relevan untuk organisasi nirlaba.
- d. Struktur organisasi dan sistem pengelolaan keuangan di PII Wilayah Jawa Barat dianggap representative untuk organisasi nirlaba sejenis.

#### 4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan:

- a. Temuan penelitian hanya berlaku untuk PII Wilayah Jawa Barat dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh organisasi PII di Indonesia.
- b. Penelitian tidak mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan selain akuntabilitas dan transparansi.
- c. Data yang dikumpulkan bersifat cross-sectional sehingga hanya menggambarkan kondisi pada saat penelitian dilakukan.
- d. Keterbatasan akses terhadap dokumen laporan keuangan secara lengkap mengingat sifatnya yang internal organisasi.

Dengan batasan-batasan tersebut, diharapkan penelitian dapat fokus pada analisis mendalam mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan tanpa kehilangan kedalaman pembahasan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dengan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Jawa Barat?
2. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Jawa Barat?
3. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Jawa Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka peneliti bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Jawa Barat.
4. Menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Jawa Barat?

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis (*Theoretical Significance*)**

- a. Pengembangan Ilmu Akuntansi Sektor Nirlaba: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pengukuran kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba.
- b. Pengayaan Literatur Tata Kelola Organisasi: Penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan mengenai penerapan prinsip good governance dalam konteks organisasi kemasyarakatan, dengan fokus pada aspek akuntabilitas dan transparansi.
- c. Validasi Empiris Teori: Hasil penelitian dapat menjadi bahan validasi empiris bagi teori agency, legitimacy theory, dan stakeholder theory dalam konteks organisasi nirlaba di Indonesia.
- d. Model Konseptual: Diharapkan dapat menyumbang pengembangan model konseptual tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba.

## 2. Manfaat Praktis (*Practical Significance*)

### a. Bagi Pengurus PII Wilayah Jawa Barat:

- 1) Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
- 2) Memberikan dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan
- 3) Sebagai acuan dalam perbaikan sistem pengendalian internal organisasi

### b. Bagi Anggota dan Stakeholders PII:

- 1) Meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan organisasi
- 2) Memberikan kepastian mengenai kredibilitas laporan keuangan yang disajikan
- 3) Memperkuat partisipasi anggota dalam pengawasan organisasi

### c. Bagi Organisasi Nirlaba Lainnya:

- 1) Dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi
- 2) Memberikan gambaran praktis tentang implementasi SAK ETAP pada organisasi nirlaba
- 3) Sebagai referensi dalam pengembangan sistem pelaporan keuangan

d. Bagi Regulator dan Pemerintah:

- 1) Memberikan masukan bagi penyempurnaan regulasi mengenai tata kelola organisasi nirlaba
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan
- 3) Memberikan insight mengenai praktik terbaik (*best practices*) pengelolaan keuangan organisasi nirlaba

e. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:

- 1) Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang
- 2) Memberikan dasar untuk pengembangan indikator pengukuran variabel yang lebih komprehensif
- 3) Sebagai bahan studi komparatif untuk penelitian di organisasi nirlaba lainnya

Dengan berbagai manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis tetapi juga mampu memberikan dampak positif secara praktis dalam meningkatkan tata kelola organisasi nirlaba di Indonesia.

## G. JADWAL PENELITIAN

Berikut adalah jadwal pelaksanaan penelitian yang direncanakan untuk periode 8 (delapan) bulan:

**Tabel 1.1**  
Jadwal Penelitian

No	Deskripsi Kegiatan	Bulan Maret	Bulan April	Bulan Mei	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Agustus	Bulan September - Desember
1	Penyusunan Proposal							
2	Konsultasi / Bimbingan							
3	Ujian Proposal							
4	Revisi Proposal							
5	Penyebaran Kuesioner dan Pengumpulan Data							
6	<i>Processing</i> , Analisis Data, dan Interpretasi Hasil							
7	Penyusunan Draft Akhir Naskah Skripsi							
8	Pendaftaran Sidang Akhir / Munaqasah							
9	Munaqasah							
10	Revisi Skripsi Final							

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

## **H. SISTEMATIK PENULISAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi dalam lima bab utama, dimana setiap bab memiliki keterkaitan logis dan berurutan untuk memudahkan pemahaman secara komprehensif. Adapun uraian sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan fondasi penelitian yang menguraikan konteks permasalahan secara menyeluruh. Bab ini memuat Latar Belakang yang menjelaskan urgensi penelitian, dilanjutkan dengan Identifikasi Masalah yang memetakan persoalan secara spesifik. Selanjutnya dirumuskan Rumusan Masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, Tujuan Penelitian sebagai sasaran yang ingin dicapai, serta Manfaat Penelitian yang menguraikan kontribusi teoritis dan praktis. Bab ini diakhiri dengan Sistematika Penulisan yang memberikan gambaran alur penyajian seluruh skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan landasan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Diawali dengan tinjauan teori organisasi nirlaba, kemudian dikaji secara mendalam teori mengenai akuntabilitas organisasi, transparansi keuangan, dan kualitas laporan keuangan. Bab ini juga memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian dalam peta keilmuan serta mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian disusun secara sistematis berdasarkan sintesis dari kajian teoritis dan empiris tersebut, yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Dimulai dengan penjelasan mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, kemudian definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel yang mencakup indikator-indikator penelitian. Populasi dan Sampel dijelaskan beserta teknik penentuannya, diikuti dengan Jenis dan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan. Instrumen Penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya, sedangkan Teknik Analisis Data menjelaskan metode statistik yang diterapkan untuk menguji hipotesis, mulai dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, hingga uji hipotesis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan temuan-temuan empiris penelitian dan analisis mendalam terhadap hasil tersebut. Diawali dengan Gambaran Umum Objek Penelitian yang memaparkan profil Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Jawa Barat. Selanjutnya disajikan Hasil Pengolahan Data yang mencakup statistik deskriptif, hasil uji kualitas instrumen, dan uji asumsi klasik. Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah, dilanjutkan dengan Pembahasan yang menginterpretasikan temuan penelitian dengan mendiskusikannya dalam konteks teori-teori yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjelaskan implikasi teoritis dan praktis dari temuan tersebut.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab penutup ini memuat Simpulan yang menjawab tujuan penelitian secara ringkas dan jelas, menyoroti temuan utama penelitian. Keterbatasan Penelitian diuraikan secara jujur untuk memberikan konteks yang tepat terhadap temuan yang diperoleh. Terakhir, Saran disampaikan yang terdiri dari saran praktis bagi pengelola organisasi nirlaba dan saran akademis bagi peneliti berikutnya, yang dikembangkan berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan dan perbaikan di masa depan.

Dengan sistematika tersebut, seluruh bab saling terhubung membangun alur pikir yang koheren, mulai dari perumusan masalah, penyediaan landasan teori, penerapan metode, analisis hasil, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

